



*Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota
Bontang*

RENCANA KERJA - P

Tahun 2017



***Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah
& Perdagangan***

**Kota Bontang
Propinsi Kalimantan Timur**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RENJA PERUBAHAN SKPD) Tahun 2017.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap eksisting Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas koperasi, UKM dan Perdagangan tahun sebelumnya dan evaluasi pelaksanaan Renja sampai triwulan kedua.

Dalam Perubahan Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan dalam rangka menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mendukung Visi tersebut, maka Misi Walikota Bontang yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang adalah menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui Pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim; dimana Bontang sebagai *Creative City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi dan daya saing perekonomian masyarakat Bontang.

Tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2017 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.



*Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota
Bontang*

**Plt. Kepala Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Bontang**

Dra. Hj. Karlina, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19621010 19911 02 001

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I	PENDAHULUAN.....
	I.1. Latar Belakang.....
	I.2. Landasan Hukum.....
	I.3. Maksud dan Tujuan.....
	I.4. Sistematika Penulisan.....
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU
	II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....
	II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....
	II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....
	II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....
	III.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....
	III.2. Program dan Kegiatan.....
BAB IV	PENUTUP.....



Lampiran.....

Tabel II.1 Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni
2017.....

Tabel II.4.1Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Tabel II.4.2Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....

Tabel III.3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017.....



Lampiran

- Tabel II.2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun Berjalan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang
- Tabel II.4.1Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
- Tabel II.4.2Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Tabel III.3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan selama semester pertama tahun anggaran 2017, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja 2017. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhatikan dimensi waktu dan permasalahan permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang yaitu *Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.*

Proses Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017 -2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang terdapat pada Dokumen RKPD awal tahun 2017, agar dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMD, RKPD dan Renstra).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 program dan kegiatan



yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

I.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang undangan yang melatarbelakangi penyusunan perubahan renja 2017 adalah

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



10. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
11. Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang (Lampiran VI, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perubahan SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang tahun 2017. Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang adalah :

- a. Menyesuaikan asumsi kerangka kegiatan dengan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini.
- b. Memberikan dasar penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja.

I.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra.

II.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Berisikan uraian mengenai tugas dan fungsi SKPD,



II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

III.2. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis, maka evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang Tahun 2016 dan capaian Renstra Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

Misi I “Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan”

Pencapaian sasaran pada Misi I pada Tahun Anggaran 2016 adalah 100% diperoleh dari tercapainya target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang Tahun Anggaran 2016, uraian semua indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan industri

Dari target 2,16% pertumbuhan IKM yang ditargetkan Tahun 2016 dapat terealisasi sebesar 6,54% sehingga indikator sasaran ini persentase rencana tingkat capaiannya sebesar 302,8%, hal ini diperoleh dari munculnya IKM baru hasil pendataan dan pendampingan yang dilakukan oleh Seksi ILMEA dan IKAHH.

2. Meningkatnya kelurahan yang memiliki produk OVOP.

Dari target 1 kelurahan dalam tahun 2016, Dinas Perindagkop & UMKM dapat merealisasikan sebanyak 1 produk untuk 1 kelurahan, sehingga indikator sasaran ini persentase rencana tingkat capaiannya 100%.

3. Jumlah kelurahan yang mendapatkan aliran gas rumah tangga

Target 1 kelurahan realisasi 1 kelurahan, capaian kinerja sebesar 100%. Meskipun untuk tahun 2016 pemasangan jaras sudah tidak ada lagi tapi Dinas Perindagkop & UMKM tetap memfasilitasi pemenuhan kebutuhan gas ini.

4. Jumlah lokasi pemanfaatan energi listrik dari PLTS Komunal

Dari target 5 lokasi tahun 2016, Dinas Perindagkop & UMKM dapat merealisasikan 5 lokasi sehingga capaiannya sebesar 100%.

Misi II “Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal”



Pencapaian sasaran pada Misi II pada Tahun Anggaran 2016 ditengah pelaksanaannya terjadi pemangkasan anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan, di Renstranya sendiri sudah direvisi sehingga kegiatannya tidak jadi dimunculkan.

Misi III “Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, efektif dan pro rakyat”

Pencapaian sasaran pada Misi III pada Tahun Anggaran 2016 adalah 100% diperoleh dari tercapainya target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang Tahun Anggaran 2016, uraian semua indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai ekspor

Target 3.022 (milion \$) dapat terealisasi sebesar 3.022 (milion \$) sehingga capaiannya 100%. Keberhasilan ini dapat diperoleh dari data penerbitan surat keterangan asal (SKA) yang diperoleh dari Seksi PLN.

2. Cakupan ketersediaan 23 komoditi

Target 23 komoditi dapat terealisasi sebesar 23 komoditi sehingga capaiannya 100%.

Misi IV “Mewujudkan kemandirian koperasi & UMKM berbasis ekonomi kerakyatan”.

1. Persentase koperasi yang aktif

Dari target koperasi aktif 85% tahun 2016, Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang dapat merealisasikan 83,75% sehingga capaiannya 98,5%. Capaiannya yang kurang dari 100% disebabkan karena adanya 1 koperasi yang sudah dibubarkan. Namun capaiannya masih dihitung tinggi karena lebih dari 90%.

2. Jumlah koperasi yang berkualitas

Dari target 30 koperasi dapat terealisasi 65 koperasi sehingga capaiannya melebihi 100%.

3. Jumlah UMKM

Dari target 18.200 UMKM yang ditargetkan ditahun 2016, Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang Kota Bontang dapat



merealisasikan menjadi 20.792 UMKM. Hal ini dapat tercapai dengan fasilitasi serta pendampingan yang terus menerus di lakukan oleh Bidang Koperasi & UKM.

Anggaran Tahun 2016 Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang mendapatkan dana anggaran Rp. 16.915.493.575 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung = 6.826.104.888
 - b. Belanja Langsung = 10.089.388.687
- telah terealisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 16.218.185.942 atau 95,88%, sedangkan sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp. 697.307.633 atau 4,12 %

Pada tahun 2016 ada 11 program dan 29 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang berdasarkan DPA Perubahan bulan Nopember 2016. Dari 11 program dan 29 kegiatan telah terlaksana dengan capaian fisik sebesar 99,76% dan capaian keuangan 95,88% per desember 2016.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target (100%)

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM, dari rencana anggaran sebesar Rp. 135.829.400 terealisasi sebesar Rp. 135.829.400 atau 100%, dengan output fasilitasi terhadap 15 pelaku UMKM dan 9 aparat studi komparatif.
2. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung UMKM
 - a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.612.500 terealisasi sebesar Rp. 6.592.500 atau 99,70% dengan output dari 40 KSP/KJKS/ dan USP/ UJKS koperasi yang rencananya dilakukan penilaian kesehatan KSP/KJKS/ dan USP/ UJKS terealisasi 40 KSP/KJKS/ dan USP/ UJKS koperasi yang dinilai kesehatannya tiap bulan sehingga capaiannya 100%.



- b. Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.430.000 terealisasi sebesar Rp. 14.430.000 atau 78.30% dengan output jumlah koperasi yang direncanakan dimonitoring perbaikan pendataan kinerja sebanyak 30 koperasi terealisasi sebanyak 30 koperasi atau 100%.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM
 - a. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir dari rencana anggaran sebesar Rp. 70.360.000 terealisasi sebesar Rp. 58.850.000 atau 83,64 % dengan output dari rencana 200 nasabah terealisasi 157 nasabah atau 78,50%
 - b. Pendampingan Pembuatan Legalitas Operasional BLUD UPT DB pola Caneling dari rencana anggaran sebesar Rp. 180.395.000 terealisasi sebesar Rp. 150.221.107 atau 83,27% dengan ouput rencana jumlah orang yang diikutkan pendidikan dan pelatihan pembuatan BLUD Dana Bergulir 10 orang aparat untuk 2 kali pendidikan terealisasi sebanyak 10 orang dan 2 kali penyelenggaraan pendidikan atau 100%.
4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional Propinsi dan Lokal dari rencana anggaran Rp. 430.312.200 terealisasi sebesar Rp. 430.312.200 atau 100% dengan output jumlah pameran nasional yang diikuti sebanyak 2 pameran dengan mengikutkan pelaku usaha sebanyak 4 pelaku dengan capaian 100%
 - b. Monitoring Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis dengan output dari 23 komoditi ber SNI yang dimonitoring fluktuasi harganya setiap bulan terealisasi 100%.
5. Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan
 - a. Peningkatan Sarana Pasar Tradisional dari rencana anggaran sebesar Rp. 304.017.000 terealisasi sebesar Rp. 304.017.000 atau 100% dengan ouput jumlah pasar tradisional yang dilakukan penyewaan lahan sebanyak 1 pasar (Pasar sementara Rawa Indah pasca Kebakaran) dan pengelolaan pasar tradisional sebanyak 3 pasar telah dilakukan dengan capaian 100%.



- b. Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 58.860.000 terealisasi sebesar Rp. 55.440.000 atau 94,19% dengan output jumlah PKL yang akan dibagikan rombongan sebanyak 7 PKL terealisasi sebanyak 7 PKL atau 100%.
6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a. Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang dari rencana anggaran sebesar Rp. 90.245.000 terealisasi sebesar Rp. 88.135.600 atau 97,66% dengan output terlaksananya semua kegiatan Dekranas Kota Bontang Tahun 2016 sebanyak 2 sub kegiatan yaitu pelantikan pengurus Dekranasda dan kegiatan konsultasi masalah Dekranasda.
 - b. Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi Pelaku IKM dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.895.000 terealisasi Rp. 48.885.600 atau 99,98% dengan output dari rencana 17 pelaku IKM yang didampingi untuk mendapatkan sertifikat halal terealisasi sebanyak 17 pelaku IKM yaitu 10 IKM dari Bontang dan 7 IKM dari Propinsi.
 - c. Promosi Produk Unggulan Kota Bontang dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.611.000 terealisasi sebesar Rp. 6.611.000 dengan output terlaksananya 1 kegiatan dalam rangka mempromosikan produk unggulan yang ada di Kota Bontang.
 - d. Pendampingan IKM dengan output dari rencana setiap pendamping IKM dapat melakukan monitoring dan pendataan IKM di setiap kelurahan yang ada di Kota Bontang dapat terealisasi 100%
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 - a. Pemeliharaan Rutin Berkala PLTS Komunal Kota Bontang dari rencana anggaran sebesar Rp. 211.825.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 179.735.500 atau 84,85% dengan output dari jumlah lokasi PLTS komunal yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 5 lokasi dapat terealisasi 5 lokasi atau 100%.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.900.000 terealisasi sebesar Rp. 3.900.000 atau



Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota
Bontang

- 100% dengan output dari rencana jumlah benda pos yang tersedia sebanyak 650 buah terealisasi sebanyak 650 buah atau 100%.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 88.764.000 terealisasi sebesar Rp. 76.391.368 atau 86,06% dengan output dari rencana jumlah sarana komunikasi 4, saluran listrik 1, air 1, dan internet 2 line dapat terealisasi semuanya atau 100%.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.000.000 terealisasi sebesar Rp. 14.294.340 atau 84,08% dengan output dari rencana jumlah kendaraan dinas yang terjaga legalitasnya kendaraan roda 2 sebanyak 27 unit, roda 4 sebanyak 8 unit, roda 6 sebanyak 1 unit, roda 3 sebanyak 3 unit terealisasi kendaraan roda 2 sebanyak 27 unit, roda 4 sebanyak 8 unit, roda 6 sebanyak 1 unit, roda 3 sebanyak 3 unit .
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.307.500 terealisasi sebesar Rp. 19.307.500 atau 100% dengan output dari rencana jumlah alat kebersihan yang tersedia sebanyak 18 jenis terealisasi sebanyak 18 jenis atau 100%.
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 106.208.000 terealisasi sebesar Rp. 106.186.500 atau 99,98% dengan output dari rencana jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia sebanyak 40 jenis, terealisasi sebanyak 40 jenis atau 100%.
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 230.400.000 terealisasi sebesar Rp. 105.350.000 atau 45,72% dengan output dari rencana jumlah barang cetakan yang tersedia sebanyak 18 jenis, terealisasi sebanyak 18 jenis atau 100%.
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.930.000 terealisasi sebesar Rp. 9.930.000 atau 100% dengan output dari



- rencana jumlah komponen listrik sebanyak 10 jenis, terealisasi sebanyak 10 jenis atau 100%.
- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 39.040.000 terealisasi sebesar Rp. 39.040.000 atau 100% dengan output dari rencana jumlah surat kabar yang tersedia 13.332 eksemplar dan buku 10 buah, terealisasi sebanyak 13.332 eksemplar dan buku 10 buah atau 100%.
 - i. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 22.970.000 terealisasi sebesar Rp. 22.910.000 atau 99,98% dengan output dari rencana jumlah logistik 10 jenis, terealisasi sebanyak 10 jenis atau 100%.
 - j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp. 107.550.000 terealisasi sebesar Rp. 107.550.000 atau 100% dengan output dari rencana jumlah kotak jamuan yang tersedia 6.180 kotak makan dan snack terealisasi sebanyak 6.180 kotak atau 100%.
 - k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.748.066.000 terealisasi sebesar Rp. 741.596.691 atau 99,99% dengan output dari rencana jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 12 bulan terealisasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 12 bulan atau 100%.
 - l. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.650.492.081 terealisasi sebesar Rp. 6.393.992.019 atau 96,14% dengan output dari rencana jumlah tenaga honorer sebanyak 140 orang terealisasi sebanyak 140 orang dan TTP PNS 65 orang terealisasi 65 orang atau 100%.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari 3 Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000 terealisasi sebesar Rp. 9.911.000 atau 99,11% dengan output dari rencana jumlah



- pemeliharaan gedung sebanyak 1 paket terealisasi sebanyak 1 paket atau 100%.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dari rencana anggaran sebesar Rp. 299.500.000 terealisasi sebesar Rp. 298.998.000 atau 99,83% dengan output dari rencana pemenuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan 1 tahun dapat terealisasi pemenuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan 1 tahun atau 100%.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi sebesar Rp. 49.742.000 atau 99,48% dengan output dari rencana jumlah pemeliharaan AC dan komputer selama 1 tahun dapat terealisasi 1 tahun atau 100%.
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal rencana anggaran sebesar Rp. 74.545.006 terealisasi sebesar Rp. 74.545.006 atau 100% dengan output dari rencana untuk bimtek, diklat dll untuk 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau 100%.
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Renstra SKPD anggaran sebesar Rp. 49.324.000 terealisasi sebesar Rp. Rp. 49.324.000 atau 95,26% dengan output dari rencana 1 dokumen Renstra terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang selanjutnya berubah nama menjadi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta tupoksinya sesuai Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.



Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota
Bontang

Pada dasarnya perubahan OPD ini tidak merubah tupoksinya yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, kurang lebihnya masih sama meskipun Seksi Sumber Daya Mineral diambil alih provinsi dan kemudian Seksi Perdagangan Dalam Negeri di tambah menjadi Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal.

Anggaran Tahun 2017 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang mendapatkan dana anggaran Rp. 11.441.759.790 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung = 5.709.716.786
 - b. Belanja Langsung = 5.732.043.004
- telah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2017 pemanfaatan dana sebesar Rp. 4.515.083.519 atau 39,46%, sedangkan sisa dana yang belum terealisasi sebesar Rp. 6.926.676.271 atau 60,54 %

Pada tahun 2017 ada 6 program dan 13 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang berdasarkan DPA awal tahun 2017. Dari 6 program dan 11 kegiatan telah terlaksana dengan capaian fisik sebesar 48,09% dan capaian keuangan 38,88% per juni 2017.

Program dan Kegiatan tahun 2017 serta capaian sampai bulan Juni 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 50.400.000 sudah terealisasi sebesar Rp. 10.947.217 atau 21,72% dengan output dari rencana jumlah sarana saluran listrik 1, air 2, dan internet 2 line sudah terealisasi 6 bulan atau 50%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 16.800.000 terealisasi sebesar Rp. 3.991.300 atau 23% dengan output jumlah kendaraan dinas yang terjaga legalitasnya baik roda 6, roda 4 dan roda 2 sudah terealisasi 20 kendaraan atau sebesar 48%.



- c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 49.700.000 terealisasi sebesar Rp. 49.421.000 atau 99,43% dengan output dari rencana jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia sebanyak 35 jenis, terealisasi sebanyak 35 jenis atau 100%.
 - d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 103.125.000 terealisasi sebesar Rp. 103.125.000 atau 100% dengan output dari rencana jumlah barang cetakan yang tersedia selama 12 bulan sudah terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%.
 - e. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.475.000 terealisasi sebesar Rp. 0 atau belum terealisasi dengan output dari rencana jumlah kotak jamuan yang tersedia 1.065 snack dan 300 makan kotak terealisasi sebanyak 530 kotak snack dan 160 kotak makanan atau 50%.
 - f. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.300.272.000 terealisasi sebesar Rp. 131.699.122 atau 43,86% dengan output dari rencana 67 jumlah aparatur yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 37 orang untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah atau 55%.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.900.400.000 terealisasi sebesar Rp. 835.000.000 atau 43,94% dengan output dari rencana ketersediaan jumlah tenaga honorer sebanyak 140 orang terealisasi sebanyak 140 orang dan TTP PNS 67 orang terealisasi 67 orang atau 100% dengan waktu sampai dengan bulan juni 2017 sehingga progresnya 50%.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.656.000 sudah terealisasi sebesar Rp. 635.241.676 atau 38,36% dengan output pembayaran e performance PNS sampai bulan juni 2017 atau 50%



3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - a. Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab/Kota Se-Kalimantan Timur dari rencana anggaran sebesar Rp. 88.392.000 terealisasi sebesar Rp. 79.332.000 atau 89,75% dengan output rapat koordinasi Se Kaltim telah terlaksana 100%.
 - b. Pendampingan Legalitas Operasional BLUD Dana Bergulir, dari rencana anggaran sebesar Rp.224.205.000 sudah terealisasi sebesar Rp. 31.489.339 atau 14,04% dengan output dari 3 dokumen yang direncanakan sudah terealisasi sebanyak 1 dokumen.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 - a. Pemeliharaan Rutin Berkala PLTS Komunal Kota Bontang, dari rencana anggaran sebesar Rp. 32.065.000 sudah terealisasi sebesar Rp. 32.065.000 atau 100% dengan output pemeliharaan PLTS di 5 lokasi telah selesai atau 100%.
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Peningkatan Sarana Pasar Tradisional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 379.426.004 sudah terealisasi sebesar Rp. 159.229.000 atau 41,97% dengan output penataan pasar tradisional di 3 pasar yaitu Rawa Indah, Telihan dan Citra Mas dengan kegiatan rutin sampai bulan juni 2017 atau 50%.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - a. Revitalisasi Pasar Tradisional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 907.783.000 yang baru dilaksanakan adalah perencanaan revitalisasi pasar tradisional, sedangkan untuk pengerjaan fisik masih dalam tahap persiapan untuk dilelang.

Evaluasi hasil renja SKPD tahun 2017 sampai dengan bulan juni tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran (tabel II.1)

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Perkembangan sector industri dan perdagangan memberikan dampak langsung pada perkembangan ekonomi secara makro pada



perekonomian Kota Bontang. Mengingat Kota Bontang menjadi tempat bernaungnya industri-industri yang besar sehingga secara makro di harapkan memberikan peran sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah.

Kinerja pembangunan pada pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan urusan perdagangan selama periode 2011 - 2016 nampak melalui indikator sebagai berikut :

Tabel II.2.1
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perdagangan Kota
Bontang
Tahun 2011 - 2016

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB						
	Dengan Migas	1,36	1,35	1,47	1,55	3,47	5,91
	Tanpa Migas	8,86	8,42	8,21	7,96	6,52	4,09
2.	Ekspor bersih	11.241.9	10.217.2	9.167.4	7.837.1	4.410.3	3.022.77
	Perdagangan (US\$)	67200,5	56.807,4	19.977,	47.802,	51.863,	1.488,29
		9	8	15	85	53	
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	719	750	616	616	799	616

Kontribusi sector perdagangan di Kota Bontang dengan migas terhadap PDRB pada tahun 2011-2014 masih di bawah 2%. Sedangkan



pada tahun 2015 kontribusinya meningkat menjadi 3,47% dan 5,91 % di tahun 2016. Sedangkan kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB tanpa migas selama tahun 2011-2016 menurun. Nilai ekspor yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 11,24 miliar dollar. Nilai kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB selalu fluktuatif disebabkan oleh banyak faktor diantaranya data ekspor dari perusahaan yang ada di Bontang serta nilai dollar yang selalu berubah-ubah. Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan semakin ketatnya persaingan.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama periode 2011-2016 pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel II.2.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel II.2.2
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang
Tahun 2011 - 2016

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kontribusi sector Industri terhadap PDRB						
	Dengan Migas	94,96	90,00	95,06	95,06	94,69	94,69
	Tanpa Migas	67,62	68,12	69,27	69,27	70,43	70,43
2.	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sector Industri	0	0,01	0,01	0,01	0,05	3,76
3.	Pertumbuhan Industri						
	Industri Besar	20,00	6,14	0,00	-16,67	-14,28	0
	Industri Rumah Tangga	3,33	3,00	3,27	13,44	42,48	6,54
4	Cakupan bina kelompok	35,41	42,11	45,45	50,00	83,0	67,0



pengrajin						0	0
-----------	--	--	--	--	--	---	---

Kontribusi sector industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas. Untuk PDRB dengan migas sector industri di dominasi oleh industri migas. Dari tahun 2011-2012 kontribusi industri terhadap PDRB dengan migas menurun dan tetap untuk 2 tahun berikutnya dan turun lagi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya perusahaan yang tutup.

Pertumbuhan industri rumah tangga selama 5 tahun terakhir meskipun mengalami kenaikan tapi sangat kecil. Dari tahun 2011 s/d 2014 masih sama yaitu 0,01% dan baru pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 3,76 % . Cakupan Bina Kelompok pengrajin cenderung mengalami kenaikan. Hal ini bisa terwujud karena jumlah tenaga pendamping yang cukup sehingga pembinaan terhadap pengrajin terus menerus dilakukan. Disamping itu munculnya kelompok kelompok pengrajin baru turut mempengaruhi kenaikan ini. Walaupun demikian, pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif serta ramah lingkungan.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di mana diharapkan mampu membantu dalam pergerakan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha kecil dan menengah.

Pembangunan dan pembinaan koperasi telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum mampu mengubah struktur perekonomian daerah. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2011-2016 sebagai berikut :

Tabel II.2.3
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2011-2016

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)



1	Persentase Koperasi Aktif	76,86	84,40	82,57	86,61	85,34	83,76
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	68	103	85	77	80	80
3	Jumlah BPR/LKM	3	3	3	3	3	4
4	Usaha Mikro dan Kecil	13.40	16.55	16.553	18.17	18.20	20.792
		1	3		6	6	

Persentase koperasi aktif di Kota Bontang mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 76,86% menjadi 86,61% di tahun 2014. Namun tahun 2015 dan tahun 2016 turun menjadi 85,34% dan 83, 76. Hal ini disebabkan adanya koperasi simpan pinjam yang mengalami kredit macet sehingga tidak aktif lagi serta koperasi yang mempunyai pinjaman pada LBDB mengalami kegagalan usaha dan akhirnya tidak aktif juga. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM pada tahun 2011 sebanyak 68 unit naik menjadi 80 unit tahun 2015 meskipun rentang tahun 2011 s/d 2014 naik turun. Usaha mikro dan kecil cenderung mengalami kenaikan dari 13.401 di tahun 2011 menjadi 20.792 di tahun 2016. Koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Bontang terus ditingkatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

II.3. ISU - ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dasar pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kepala dinas mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
8. Pelaksanaan tugas lain-lain.

B. Sekretaris



Sekretaris mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di maksud sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD
3. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan
4. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan
5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
6. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
7. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian
8. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
9. Pengoordinasian, pembinaan, kepada bawahan
10. Pelaksanaan tugas lain-lain

C. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) serta industri logam, mesin, elektro dan aneka (ILMEA) .Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan industry kimia, agro dan hasil hutan



3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan industry logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA)
4. Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
5. Pelaksanaan tugas lain-lain

D. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di maksud kepala bidang perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaporan kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perdagangan dalam negeri
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan metrologi legal.
4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perdagangan luar negeri
5. Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
6. Pelaksanaan tugas lain-lain

E. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di maksud Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaporan kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kelembagaan dan perizinan koperasi dan UMKM



3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan usaha dan pembiayaan koperasi dan UMKM.
4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengawasan dan pembinaan koperasi dan UMKM.
5. Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
6. Pelaksanaan tugas lain-lain.

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk pembinaan pengembangan pelayanan teknis terhadap industry, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kota Bontang, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu :

1. UPTD Dana Bergulir
2. UPTD Pasar

II.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017 - 2021. Rencana kerja Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi masalah terkait perkoperasian, perdagangan dan perindustrian. Di sisi lain Dinas Koperasi, UKM dan



Perdagangan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun satu program yang baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan setiap stakeholder.

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah di tuangkan di dalam Dokumen RKPD awal tahun 2017, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang tahun 2017 adalah berdasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra Dinas.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017 di selaraskan pada Visi dan Misi Walikota Bontang yaitu pada Visi Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tupoksinya mendukung Misi Walikota Bontang pada Misi 3 yaitu Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui Pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim;



Bontang sebagai *Creative City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, daya saing masyarakat Kota Bontang.

Dengan **Tujuan** :

1. Meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah

Sasaran :

- a. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi
- b. Meningkatnya sarana perdagangan dan sistem distribusi perdagangan serta ekspor
- c. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB

2. Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang

Sasaran :

- a. Meningkatnya usaha kecil menengah
- b. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan gas untuk rumah tangga
- c. Peningkatan fasilitas dana bergulir

Berikut tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi	1 % koperasi aktif
	Meningkatnya sarana perdagangan dan sistem distribusi perdagangan serta ekspor	1 Peningkatan pasar tradisional yang ditata ulang 2 Efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3 % alat UTTP yang berterra 4 Ekspor bersih perdagangan 5 Cakupan bina kelompok perdagangan/



		usaha informal
	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas 2 % pertumbuhan IKM 3 Cakupan bina kelompok pengrajin
Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	Meningkatnya usaha kecil menengah	1 Jumlah UMKM 2 Jumlah UKM nun BPR/ LKM UKM (KSP/USP)
	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan gas untuk rumah tangga	1 Jumlah kelurahan berjaringan gas rumah tangga
	Peningkatan fasilitas dana bergulir	1 Dokumen BLUD 2 Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat penguatan modal dan usaha RT yang mendapatkan penguatan modal

III.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, perencanaan pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Urusan OPD dan Belanja



Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program) dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017 direncanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TTP) sebesar Rp. 5.709.716.786 terdiri dari :

1. Belanja Gaji PNS sebesar Rp. 3.951.224.786
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp. 1.758.492.000

B. Belanja Langsung

- Belanja Langsung DPA Awal sebesar Rp. 5.732.043.004 sedangkan
- Belanja Langsung Setelah Perubahan (APBDP) sebesar Rp. 6.862.479.939
- Sehingga bertambah menjadi Rp. 1.130.436.935

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.400.000. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran telepon, listrik dan air untuk UPT Dana Bergulir dan UPT Pasar selama 12 bulan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp. 16.800.000. Pada Anggaran Perubahan bertambah sebesar Rp. 10.100.000, sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 26.900.000. Kegiatan ini untuk membayar STNK, KIR dan Ganti Plat untuk 42 kendaraan dinas baik roda 2, roda 4 ataupun roda 6 yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selama tahun 2017.

c. Penyediaan ATK



Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.700.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan ATK sebanyak 25 jenis untuk satu tahun anggaran

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp. 103.125.000. Pada Anggaran Perubahan bertambah sebesar Rp. 25.500.000, sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 128.625.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetak yang terkait dengan administrasi perkantoran sebanyak 1 paket dan 3 jenis, belanja penggandaan/ fotocopy serta pemeliharaan mesin fotocopy selama 1 tahun anggaran.

e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini melaksanakan 1 paket pengadaan yaitu peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja tabung gas, pengisian air minum isi ulang serta belanja material/ bahan sembako untuk 12 bulan

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp. 23.475.000. Pada Anggaran Perubahan bertambah sebesar Rp. 29.500.000, sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 52.975.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu dan makanan dan minuman kegiatan.

g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp. 300.272.000. Pada Anggaran Perubahan bertambah sebesar Rp. 117.494.400, sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 417.766.400. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas dalam daerah (provinsi) dan luar daerah (regional dan nasional) selama 1 tahun anggaran.

h. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp. 1.900.400.000. Pada Anggaran Perubahan bertambah sebesar Rp.



Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota
Bontang

264.651.015, sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 2.165.051.015. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran honorarium untuk maksimal 140 orang tenaga non PNS yang ada di Dinas ataupun di UPT Dana bergulir dan UPT Pasar.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 89.730.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan BBM serta jasa service kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 6 sebanyak 42 kendaraan selama 1 tahun anggaran.
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000. Kegiatan ini melaksanakan 1 paket kegiatan pemeliharaan komputer, sprinter dan notebook selama 12 bulan.

3. Program Peningkatan Kinerja Aparatur

- a. Peningkatan Kinerja Aparatur
Kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp. 1.656.000.000. Pada Anggaran Perubahan berkurang sebesar Rp. 361.898.480 sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 1.294.101.520. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja tidak tetap untuk 67 PNS di Dinas, UPT Pasar dan UPT Dana Bergulir.

C. Belanja Langsung Urusan Program

1. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 51.000.000. Kegiatan ini



untuk membiayai belanja barang dan jasa pelaksanaan pameran pembangunan tahun 2017.

b. Publikasi Kegiatan Pembangunan

Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Kegiatan ini untuk membiayai pelaksanaan publikasi kegiatan pembangunan khusus untuk bidang koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang

2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

a. Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab/ Kota Se-Kalimantan Timur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 88.392.000. Kegiatan ini melaksanakan Rakor Perindagkop & UMKM Se Kaltim dengan melibatkan peserta Rakor dari kabupaten kota yang ada di Kaltim dan Kaltara.

b. Pendampingan Legalitas Operasional BLUD Dana Bergulir

Kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp. 224.205.000. Pada Anggaran Perubahan berkurang sebesar Rp. 41.400.000. sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 182.805.000. Kegiatan ini melaksanakan pendampingan legalitas operasional Dana Bergulir, sosialisasi serta belanja barang dan jasa pendampingan BLUD selama tahun 2017.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Penyediaan Permodalan Bagi UKM dan Koperasi

Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang yang diserahkan ke masyarakat berupa pengadaan alat usaha cuci motor untuk 8 orang /UKM



4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 - a. Pemeliharaan Rutin Berkala PLTS Komunal Kota Bontang
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.065.000. Kegiatan ini melaksanakan jasa pemeliharaan dan penggantian suku cadang PLTS Komunal untuk 5 lokasi di pesisir Kota Bontang.
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
Kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp 379.426.004. Pada Anggaran Perubahan bertambah sebesar Rp. 320.960.000, sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 700.386.004. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan pakaian khusus petugas lapangan UPT Pasar, BBM kendaraan dinas operasional pasar, sewa lahan pasar, cetak karcis, penyemprotan pasar serta pengadaan meja untuk pedagang di pasar.
 - b. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Kota Bontang.
Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Kegiatan ini berupa 1 paket perencanaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pasar Loktuan Kota Bontang.
 - c. Pemeliharaan Pasar Kota Bontang
Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 195.000.000. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan lingkungan pasar, pengadaan bak sampah, rambu-rambu, pemeliharaan sarana umum pasar Rawa Indah (perbaikan talang, atap dan drainase) dan pemeliharaan pasar Citra Mas (Perbaikan Talang)
6. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - a. Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan
Kegiatan ini semula tidak dianggarkan. Pada Anggaran Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 159.800.000. Kegiatan ini



melaksanakan pengadaan barang yang diserahkan ke masyarakat berupa pengadaan rombongan untuk 17 PKL.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - a. Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 907.783.000. Kegiatan ini melaksanakan 1 paket rehab/ pemeliharaan pasar tradisional (Pasar Taman Telihan) tahun anggaran 2017.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2017 yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.



Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota
Bontang

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 2017 dipastikan masih mempedomani Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 2017-2021, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan industri yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kota Bontang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan.

Semoga Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2017. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

**Plt. Kepala Dinas
Koperasi, UKM dan
Perdagangan
Kota Bontang**

Dra. Hj. Karlina, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19621010 19911 02
001